

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu terbentuk pada Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, maka ditetapkannya Peraturan Bupati Belu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkannya Peraturan Bupati Belu Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Kemudian untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka dibentuklah Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No 1 Tulamalae Atambua Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak terbentuk pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu telah mengalami beberapa kali pergantian Pimpinan. Daftar Pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sejak awal sampai sekarang:

1. Jonisius R. Mali, SH (Tahun 2017 – 2020)
2. Marsianus Loe Mau, SH (Tahun 2020 – 2023)
3. Drs. Anton Suri (Tahun 2023)

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pendataan
 - (2) Sub Bidang Penetapan.
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pembukuan.
 - (2) Sub Bidang Pelaporan.
- e. Bidang Sistem, Prosedur Penagihan dan Keberatan membawahi:
 - (1) Sub Bidang Penagihan.
 - (2) Sub Bidang Keberatan.

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:

(1) Sub Bidang Pengembangan.

(2) Sub Bidang Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi

(2) Sub Koordinator Substansi Keuangan

(3) Sub Koordinator Substansi Penilaian

(4) Sub Koordinator Substansi Sistem Informasi

Penggalan dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pemungutan pendapat daerah dievaluasi setiap tahun anggaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

4.2 Visi dan Misi Kantor Bapenda

Visi: *“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”.*

Asumsi Dasar Visi diatas dimaknai sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Optimal** adalah kondisi tertinggi yang mungkin untuk dilakukan seseorang / sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik
3. **Pembangunan Daerah**, adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:
 1. Meliputi seluruh aspek kehidupan
 2. Dilaksanakan secara terpadu
 3. Meningkatkan swadaya masyarakat
4. **Berkualitas**, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, olahraga dan kebudayaan) dengan

indikator kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing.

Misi:

(1) Meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan:

Misi ini mengandung makna bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan perlu ditempuh berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD mengalami peningkatan Misi ini mengandung isu strategis Badan Pendapatan Daerah yang ke 1: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Isu strategis 2: Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber -sumber PAD.

(2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi ini mengandung makna bahwa sumber daya aparatur memegang peranan penting dalam upaya peningkatan PAD karena itu keahlian khusus perpajakan yang diperlukan perlu dikuasai oleh aparat di Badan Pendapatan Daerah. Misi ini mengandung isu strategis Bapenda yang ke 3: Peningkatan Pelayanan Publik.

(3) Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penyampaian informasi yang dilakukan melalui hubungan vertikal, horizontal dan diagonal sehingga terjalin komunikasi yang lancar demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas terutama yang berkaitan dengan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga didapat data yang riil dan valid.

4.3 Program dan Kegiatan Kantor Bapenda

Adapun Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program Dan Kegiatan Kantor Bapenda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)
1	2	3	4	5
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
			KEUANGAN	
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan
		2,2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
				Jumlah Tenaga Administrasi/ Pegawai Tidak Tetap

		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah
		4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli
		4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
		4,3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
		4,4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
				Jumlah Makanan dan Minuman Tamu
		4,5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
		5,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan
		5,2	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan
		5,3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang dibeli dan jumlah Surat/Paket yang dikirim
		6,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
		6,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan
				Jumlah Tenaga Kebersihan/ Pegawai Tidak Tetap
		7	Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
				Jumlah Tenaga Sopir/ Pegawai Tidak Tetap
		7,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, Jumlah Peralatan Kerja yang diiperbaiki
		7,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara, Jumlah Tenaga Keamanan

				Jumlah Tenaga Penjaga Malam/ Pegawai Tidak Tetap
		II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan
		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan
		1,1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1,2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Jumlah Kegiatan Penggalan Potensi Pajak Daerah, Jumlah Kegiatan Sosialisasi
		1,3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi
		1,4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		1,5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data
		1,6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Realisasi dan Tunggakan Pendapatan, Jumlah Peta Persil Objek PBB-P2
		1,7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan
		1,8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Konsultasi
		1,9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data yang diverifikasi
		1,10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah PAD yang ditagih
		1,11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak yang diselesaikan
		1,12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Realisasi dan Tunggakan PAD, Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi, Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumlah Kegiatan Monev Pengelolaan PAD
		1,13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.4 Struktur Organisasi Kantor Bapenda

